



News Title : RI Harus Jadi Acuan Harga CPO Dunia	
Media Name : Koran Sindo	Journalist : sudarsono
Publish Date : 03 March 2023	Tonality : Positive
News Page : 9	News Value : 468,000,000
Resources : Dwi Sutoro (Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Rahmanto Amin Jatmiko (Direktur PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)), DirektKabul Wijayanto (Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kela pa Sawit (BPDPKS))	Ads Value : 156,000,000
Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Aturan Izin Ekspor CPO

RI Harus Jadi Acuan Harga CPO Dunia

JAKARTA – Pemerintah dan pelaku usaha sepakat membangun rujukan harga CPO di dalam negeri melalui bursa komoditas. Keberadaan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) layak dioptimalkan.

Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Dwi Sutoro mengatakan, pengembangan bursa CPO Indonesia menjadi sangat penting untuk mengukuhkan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar sawit di dalam negeri. Saat ini Indonesia masih menggunakan rujukan harga CPO dari Bursa Malaysia (MDEX) dan Bursa Rotterdam di Belanda. Penggunaan bursa di luar negeri kadang memberikan dampak bagi keseimbangan penawaran dan permintaan di dalam negeri.

"Saat ini di Indonesia belum ada bursa komoditas yang mampu menggerakkan tiga fungsi yaitu *price discovery* (pembentukan harga), *price reference* (acuan harga) dan *hedging* (lindung nilai)," sebut Dwi pada seminar hibrida bertema "Strategi Indonesia Menjadi Harga CPO Dunia" di Jakarta kemarin.

Karena itulah, Dwi mengusulkan ke pemerintah supaya dapat memanfaatkan sistem perdagangan CPO yang sudah ada seperti KPBN. Strategi ini menjadi sangat penting apabila Kementerian Perdagangan (Kemendag) ingin mengejar target pembentukan harga acuan CPO

pada Juni mendatang.

Dwi menjelaskan bahwa bursa CPO yang ideal mempunyai tiga fungsi *price discovery*, *price reference*, dan *hedging* dari sebuah proses yang *fair*, efisien, transparan, dan terpercaya. "Gagasan membangun tata niaga komoditas CPO Indonesia melalui pengembangan bursa CPO Indonesia ini harus didukung dan didiskusikan sebagai tahapan untuk membuat Indonesia menjadi barometer sawit dunia," ucapnya.

Lebih lanjut Dwi menyampaikan bahwa pembentukan tata niaga sawit setidaknya harus mencakup empat aspek. Antara lain aspek keadilan, efisiensi, nilai tambah, dan keberlanjutan. "Keterlibatan pemerintah, BUMN, dan swasta diharapkan bisa menciptakan sinergi yang positif dalam mendesain tata niaga sawit Indonesia yang adil, efisien, transparan, dan terpercaya," ungkapnya.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, strategi membentuk harga rujukan CPO Indonesia merupakan bagian dari membangun kedaulatan industri sawit di dalam negeri. Karena itulah, Bappebti

sedang menyusun aturan baru yang akan mewajibkan ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) melalui bursa berjangka komoditas.

Aturan tersebut masih digodok dan membutuhkan kajian matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan *domestic market obligation* (DMO) dan eksportir. Lalu, akan dikaji pula produk CPO yang wajib diekspor melalui bursa berjangka. Selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan.

Peranan Bappebti membentuk referensi harga komoditas di Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. "Bappebti berhasil membangun *price reference* timah yang berada di dua bursa yaitu BBJ dan ICDX. Itu sudah menjadi harga acuan bagi dunia," ujarnya.

Menurut Didid, tujuan dari harga referensi ini adalah membentuk harga pasar yang transparan dan diyakini semua pihak sehingga dapat menjadi referensi harga.

Direktur PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Rahmanto Amin Jatmiko mengatakan bahwa KPBN sudah punya persyaratan sebuah bursa yang memungkinkan untuk secara resmi dijadikan sebagai bursa CPO Indonesia dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan bursa yang lain atau membentuk bursa yang baru.

Ada enam pertimbangan KPBN layak dijadikan acuan harga CPO sesuai keinginan pemerintah. Pertama, KPBN mampu mempertemukan penjual dan pembeli dalam sebuah platform marketplace yang fair dan efisien, yang mampu membentuk harga harian yang disepakati dan kontinu.

Kedua, harga CPO KPBN telah menjadi acuan harga patokan tandan buah segar (TBS) provinsi dan besaran insentif biodiesel. Selain itu, dijadikan acuan harga oleh Oilworld, Indef, Gapki, Bloomberg Intelligent Analysis, dan Kemenko Marves. Ketiga, data harga KPBN saat ini tercatat dan tampil dalam sistem platform media global Bloomberg dan Reuters.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kabul Wijayanto mengaku sepakat dengan ada acuan harga komoditas CPO Indonesia yang diharapkan dapat dijadikan acuan harga sawit global. Selain itu harga acuan komoditas yang mudah diakses dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan memudahkan BPDPKS dalam menyusun rencana belanja program kerja.

"Harapan kami dengan adanya bursa menjadikan Indonesia jadi acuan harga dunia. Karena itulah, kita perlu satu data soal ini baik terkait harga, luas perkebunan, maupun neraca komoditas untuk produksi, konsumsi, dan ekspor," kata.

■ sudarsono